



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 2

YOGYA (MERAPI) - Tak kunjung disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas membuat para penyandang dan penggiat disabilitas di Kota Yogyakarta bertanya-tanya. Namun demikian, DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen merampungkan raperda tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Ini kedatangan kami yang kedua untuk *ngarahke*. Ini sudah lewat Februari tapi *kok* belum disahkan. Makanya kami pertanyakan perkembangannya. Kenapa belum disahkan dalam rapat paripurna," kata Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Arni Surwanti saat mendampingi DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (7/3).

Dia menjelaskan, pembahasan muatan Raperda Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas itu sudah dibahas sejak 2015. Pada November 2016, forum penyandang disabilitas juga telah mendampingi dewan dan meminta pembahasan raperda dilanjutkan. Itu karena mendingar ada penundaan pengesahan raperda itu lantaran penyelesaian naskah akademik dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyand

ang Disabilitas. Dalam pertemuan itu disepakati pembahasan raperda dilanjutkan dan komunitas penyandang disabilitas memberikan masukan naskah akademik raperda yang telah disesuaikan dengan UU Nomor 8 tahun 2016.

"Kota Yogyakarta ini satu-satunya di tingkat II DIY yang belum mengesahkan raperda disabilitas. Padahal sudah ada komitmen mewujudkan kota inklusi. Kami menginginkan DPRD segera menggelar rapat dan mengesahkan raperda ini," paparnya.

Menurutnya perda perlindungan penyandang disabilitas itu penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mengingat saat ini, lanjutnya, masih banyak hambatan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di

PERLINDUNGAN DISABILITAS

DPRD Komitmen

Rampungkan Raperda



Para penyandang dan penggiat disabilitas saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Yogyakarta.

lam pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kekerasan kepada penyandang disabilitas.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Yogyakarta, Winarsih berharap sosialisasi dilakukan secara menyeluruh ke masyarakat setelah raperda disabilitas disahkan. Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi menyatakan, hanya tinggal 5 pasal dalam

raperda yang belum dibahas. Setelah itu dilakukan finalisasi perda dan fasilitasi Penda DIY untuk dievaluasi. Diakukannya, pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti pendidikan dari sisi kualitas masih kurang. Diharapkan dengan adanya perda disabilitas kualitas dan kuantitas pendidikan inklusif juga meningkat.

Anggota Panitia Khusus Raperda Perlindungan dan Peme

nuhan Hak Penyandang Disabilitas, Diani Anindiyati menambahkan, pansus tetap berkomitmen menyelesaikan perda. Dalam penyusunan raperda mengadopsi masukan naskah akademik dari forum penyandang disabilitas. "Kami gunakan prinsip kehati-hatian. Kami tidak ingin hak-hak disabilitas terlewat. Penyelesaian tidak sekadar mengejar selesai. Memang jadi terkecual molor," tandas Anni. (Tri)-m

-Din. Sosial
-Bag. Hukum
Netral
Biasa
Diketahui

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Kepala
Sekretaris

Ttd

Trihastono, S.Sos. MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005